

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cetakan Kedua,
PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2010

DR. Umar Congge. Legislatif, Kinerja dan Pengawasan. Yayasan
Intelegensia Indonesia, 2019.

I Gede Yusa. *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945*.
Setara Press, 2016.

Ubaedillah dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewarganegaran (civil
education) "Pancasila, HAM, dan Masyarakat Madani". Jakarta:
Prenadamedia Group, 2003.

Risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia(Laporan
pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang
Tahunan MPR RI) Tahun kelima 2003-2004

Rohaniah Yoyoh, Efriza, Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu
Politik, Malang, Intrans Publising 2005

Jurnal

Ariana Yunus, Armin, Rusdi. Peran Aktor dalam Pembentukan Hak Angket di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019. *Politics and Humanism Journal*. Hal 21-28, Volume 1, No 1, Juni 2022

Armin, Ariana Yunus, Rusdi. Peran Aktor dalam Pembentukan Hak Angket di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019. Hal 21-28, Volume 1, No 1, 2022

Asrizal & Sobirin Malian. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen. Vol 01, No 02, Hal 129-144, 19 Oktober 2021.

Aziz Setyagama. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Hal 86-96, Volume 7, Nomor 2, September 2019.

Bima, Muhammad Rinaldy, Muhammad Kamal, and Hardianto Djanggih. "Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Kertha Patrika*, hal 27-39. Volume 41, Nomor 1, April 2019

Dadang Supradan. Sejarah dan prospek demokrasi, *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol 2, No 2, Hal 125-135, Desember 2015

Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945Sebelum Dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya,hal. 333-334, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

Hananto Widodo. Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Perspektif Hukum. Hal 230-249, volume 19, no 2, November 2019

Izzah Qotrun Nada. Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan Mk),hal. 61-78, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022.

Komelius Benuf. Politik Hukum Legislatur dan Ideologi Pancasila, Jurnal Gema Keadilan, hal 85-92, Volume 5, Nomor 1, September 2018.

Muhammad Rinaldy Bima, Muhammad Kamal, Hardianto Djanggih. Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kertha Patrika, hal 27-39, Volume 41, No 1, April 2019

Nugroho, Wahyu. "Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM." *Jurnal Hukum* 28.2 (2022): 1025-1060.

Ruhenda, Heldi, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi. Tinjauan Trias Politika Terhadap Sistem Politik dan Pemerintahan Di Indonesia, *Journal Of Governance And Social Policy*, Hal 58-69, Volume 1, No 2, Desember 2020

Rusminah, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERKAIT HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Hukum*, hal 71-80, Volume 8, No 2, Desember 2020

Sapto Hermawan "Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, hal 59-80, Volume 18, No 1, Maret 2021.

Sugiarto, T. (2013), Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2): 188-196, h.188.

Titik Triweulan Tutik. HARMONISASI FUNGSI DPD DAN DPR PADA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL GUNA PELAKSANAAN CHECKS AND BALANCES. Yustita Jurnal Hukum. Hal 39-47, Volume 1, No 3, Desember 2012

Totok Sugiarto & Purwanto. PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DANA BENCANA NON ALAM:STUDI TERHADAP KONSEKUENSI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2020. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukuk, hal 170-183, Volume 10, Nomor 2, September 2022

T.Fahrul Gafar, Santi Octavia, Zamhasari, Suryaningsih, Mendra Wijaya. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Hal 539-552, Volume 1, Nomor 3, Januari 2022.

Umar Congge. Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah Dengan Pihak Ketiga Di Kabupaten Sinjai, Jurnal Ilmiah Administrasi, Volume 3, Nomor 2, Hal 111-125, April 2013.

Yopy Perdana Kusuma. PROPAGANDA HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK (Analisis Propaganda dan Komunikasi Politik). Jurnal LONTAR, Vol 5, No 1, Januari-Juni 2017, Halaman 41-55

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang MD3

Lihat pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Mengenai Indonesia Sebagai Negara
Hukum

Lihat Pasal 199 Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-undang Pasal 20 A ayat (1) dan Ayat (10) Tentang Fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Pasal 79 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Undang-Udang Nomor 17 Tahun 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, halaman 109.

Sumber Internet

Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK. (12 April 2023).

Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>

<https://kumparan.com/kkumparan-news/tanggapan-kpk-atas-10>

rekomendasi-pansus-hakangketdpr. 12 April 2023 (22.30). KPK. 2018. KPK Sebut Lembaga Pengawas Usulan Pansus Angket Mengadaada.